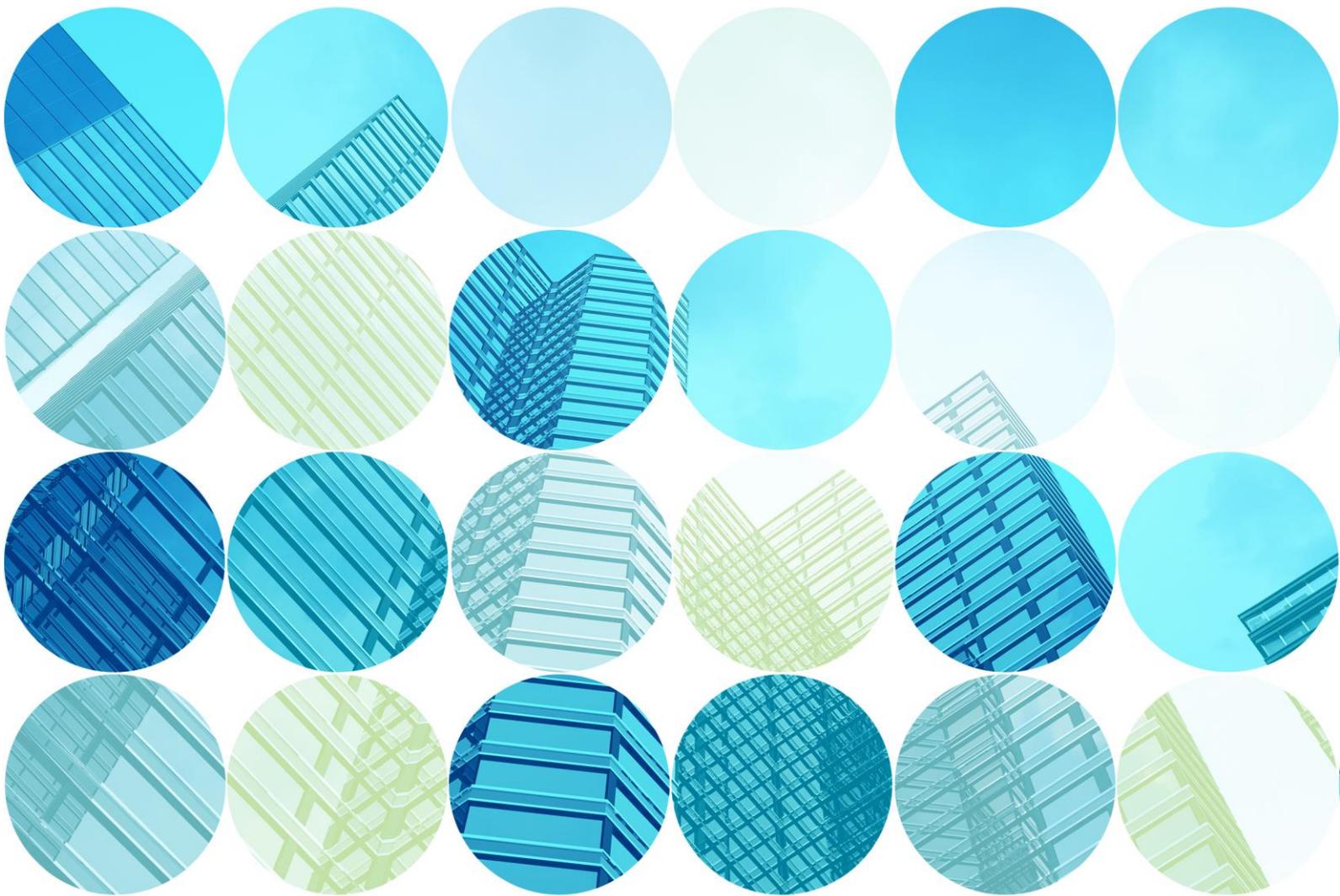




2021

LAPORAN KINERJA



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN**

Disusun oleh:
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Gambaran Umum SKPD	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Perencanaan Kinerja SKPD Lama.....	9
2.1.1. Rencana Strategis SKPD	9
2.1.2. Rencana Kerja SKPD.....	13
2.1.3. Indikator Kinerja Utama SKPD.....	17
2.1.4. Perjanjian Kinerja SKPD	18
2.2. Perencanaan Kinerja SKPD Baru	19
2.2.1. Rencana Strategis SKPD	19
2.2.2. Rencana Kerja SKPD.....	22
2.2.3. Indikator Kinerja Utama SKPD.....	25
2.2.4. Perjanjian Kinerja SKPD	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1. Akuntabilitas Kinerja SKPD Lama.....	28

3.1.1.	Capaian Kinerja Organisasi	28
3.1.2.	Realisasi Anggaran	39
3.1.3.	Analisis Efektivitas dan Efisiensi	43
3.2.	Akuntabilitas Kinerja SKPD Baru	48
3.2.1.	Capaian Kinerja Organisasi	48
3.2.2.	Realisasi Anggaran	57
3.2.3.	Analisis Efektivitas dan Efisiensi	60
BAB IV PENUTUP		65
4.1.	Simpulan	65
4.2.	Saran Perbaikan	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	13
Tabel 2.2.	Rencana Anggaran dan Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021	14
Tabel 2.3.	Perumusan Indikator Kinerja Utama SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021	18
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Kepala BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021	19
Tabel 2.5.	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026	21
Tabel 2.6.	Rencana Anggaran dan Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022	22
Tabel 2.7.	Perumusan Indikator Kinerja Utama SKPD pada BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021	26
Tabel 2.8.	Perjanjian Kinerja Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021	26
Tabel 3.1.	Skala Penilaian Capaian Kinerja SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021	28
Tabel 3.2.	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021	29
Tabel 3.3.	Rincian Hasil Evaluasi SAKIP pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2019 dan 2020.....	33

Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021	35
Tabel 3.5.	Pengukuran Capaian Tujuan Strategis SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021	39
Tabel 3.6.	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021	40
Tabel 3.7.	Tingkat Serapan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021	42
Tabel 3.8.	Skala Penilaian Efektivitas Kinerja SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021	43
Tabel 3.8.	Pengukuran Efektivitas dan Efisiensi Capaian Sasaran Strategis SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021	44
Tabel 3.9.	Pengukuran Efektivitas dan Efisiensi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021	45
Tabel 3.10.	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis SKPD pada BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021	49
Tabel 3.11.	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021	55
Tabel 3.12.	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021	58
Tabel 3.13.	Tingkat Serapan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis SKPD pada BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021	60

Tabel 3.14. Pengukuran Efektivitas dan Efisiensi Capaian Sasaran Strategis SKPD pada BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021	60
Tabel 3.15. Pengukuran Efektivitas dan Efisiensi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Balangan	8
Gambar 2.1. Hubungan Keterkaitan Renstra PD BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ...	12
Gambar 2.2. Hubungan Keterkaitan Renstra PD BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026	21
Gambar 3.1. Tangkapan Layar Aplikasi Web untuk Mengukur Indeks Implementasi Manajemen NSPK Manajemen ASN (https://indeksnspk.bkn.go.id/) .	50
Gambar 3.2. Tangkapan Layar Aplikasi Web SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) untuk Mengukur Indeks Sistem Merit (https://sipinter.kasn.go.id/)	52
Gambar 3.3. Tangkapan Layar Aplikasi Web Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BKPSDM untuk Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (https://ikm.bkppd-balangankab.info/skm).....	53

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala taufik dan hidayah-Nya, akhirnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan Tahun 2021 selesai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan sumber daya (anggaran) untuk mencapai kinerja yang diperjanjikan dengan Bupati Balangan. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis (kinerja utama) yang ditetapkan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehingga substansi yang dihasilkan dalam laporan ini sudah dapat mengkomodir hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut. Tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal, yang telah memberikan dukungan dalam bentuk data dalam proses penyusunan laporan. Meskipun secara jujur harus diakui masih terdapat kelemahan/kekurangan dalam penyusunan laporan dimaksud.

Akan tetapi di tengah keterbatasan dan kekurangan sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dokumen perencanaan ini dapat menjadi bahan evaluasi, terutama pihak internal di BKPSDM Kabupaten Balangan. Sehingga kelemahan yang didapati dan target yang masih belum dapat dicapai pada tahun 2021 akan dapat dilakukan tindakan korektif maupun preventif di masa yang akan datang. Hal tersebut semata-mata dalam rangka optimalisasi capaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditentukan dalam

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) BKPSDM Kabupaten Balangan
Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak yang berkompeten sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Parangin, Februari 2022

Kepala Badan,



H. Sufriannor, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atau Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP). Pelaporan kinerja secara umum bertujuan untuk memberikan informasi capaian kinerja yang terukur atas target kinerja yang diperjanjikan.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut, dibutuhkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, transparan, dan akuntabel serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Seiring dengan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan akan selalu melakukan evaluasi tahunan terhadap capaian kinerja utama (sasaran strategis) yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan BKPSDM dalam mencapai kinerja utama yang ditetapkan.

Selain melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja yang ditetapkan, BKPSDM Kabupaten Balangan juga akan terus melakukan reviu dokumen perencanaan strategis yang telah disusun. Hal tersebut beranjak dari dinamika kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur yang sangat kompleks, dinamis, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan/pergeseran lingkungan strategis. Akan tetapi, isu strategis di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur pada Pemerintah Kabupaten Balangan sampai saat ini berfokus pada masih rendahnya kompetensi SDM aparatur. Oleh karena itu, strategi pada tahun-tahun selanjutnya adalah merumuskan, menyusun, dan melaksanakan serta mengendalikan dan mengevaluasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur, optimalisasi tata kelola, dan peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
4. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan kinerja SKPD BKPSDM Kabupaten Balangan adalah sebagai bahan evaluasi, laporan, dan pertanggungjawaban atas kinerja dan sumber daya (anggaran) yang didayagunakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran startegis (kinerja utama) dan melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah sebagai berikut:

1. Sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja beserta sumber daya (anggaran) yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian kinerja tersebut kepada Pimpinan (Bupati Balangan). Sarana berupa laporan tersebut berisi informasi tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang diperjanjikan.
2. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau meningkatkan kinerja organisasi, baik dalam bentuk penyusunan regulasi, distribusi, dan alokasi sumber daya yang dimiliki.

1.4. Gambaran Umum SKPD

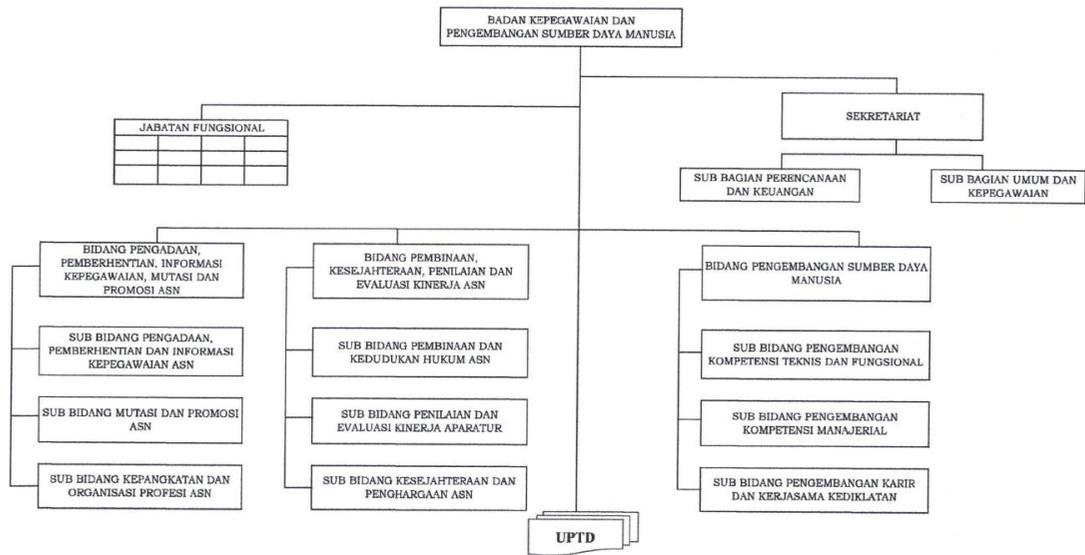
BKPSDM Kabupaten Balangan merupakan SKPD baru pengganti Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Balangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, BKPSDM merupakan Badan Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Adapun tugas BKPSDM sesuai Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan kesekretariatan Organisasi Profesi ASN Kabupaten.

Fungsi BKPSDM Kabupaten Balangan sebagai penjabaran tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Pengelolaan kesekretariatan Organisasi Profesi ASN Kabupaten;
6. Pelaksanaan administrasi badan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi BKPSDM Kabupaten Balangan terdiri dari:

1. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN
 - a. Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - b. Sub Bidang Mutasi dan Promosi ASN
 - c. Sub Bidang Kepangkatan dan Organisasi Profesi ASN
3. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Kedudukan Hukum ASN
 - b. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan ASN
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
 - c. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Kerjasama Kediklatan
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Balangan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja SKPD Lama

2.1.1. Rencana Strategis SKPD

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien. Dengan adanya perencanaan strategis, BKPPD diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka BKPPD diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, ke mana BKPPD Kabupaten Balangan hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pernyataan visi BKPPD adalah:

**“Mewujudkan SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Balangan yang
Profesional”**

Yang mengacu pada visi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021:

**“Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera melalui
Pembangunan Sumber Daya Manusia”**

2. Misi

Misi merupakan formulasi umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi BKPPD Kabupaten Balangan mengambil peran sesuai dengan Misi ke-IV Kepala Daerah, yaitu Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah. Kata optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau **optimasi** (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal sudah ada ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, Misi BKPPD Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara melalui Peningkatan Kompetensi dan Penataan Jabatan yang Memenuhi Standar Kompetensi.
- b. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Sistem Pelaporan Kinerja.

3. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Adapun tujuan yang ingin dicapai BKPPD Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas melalui Peningkatan Kompetensi dan Penataan Jabatan yang Memenuhi Standar Kompetensi.
- b. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan melalui Pengembangan Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pelaporan Kinerja.

4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sehingga sasaran jangka menengah BKPPD Kabupaten Balangan meliputi:

- a. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah.
- b. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Cepat dan Tepat.
- c. Meningkatnya Efektivitas Pelaporan.

Keterkaitan hubungan antara Renstra PD BKPPD Kabupaten Balangan dengan RPJMD Kabupaten Balangan dapat dilihat pada skema berikut:

RPJMD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016-2021	RENSTRA PD BKPPD TAHUN 2016-2021 (SKPD LAMA)
VISI	TUJUAN 1
Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia	Terwujudnya sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas melalui peningkatan kompetensi dan penataan jabatan yang memenuhi standar kompetensi
	Indikator Tujuan 1
	Indeks Profesionalitas ASN
MISI VI	TUJUAN 2
Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pengembangan sistem pelayanan administrasi kepegawaian dan pelaporan kinerja
TUJUAN 6	Indikator Tujuan 2
Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat
Indikator Tujuan 6.1	SASARAN 1
Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara
Indikator Tujuan 6.2	Indikator Sasaran 1
Nilai Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur yang Mengikuti Diklat Struktural
SASARAN 6.1	SASARAN 2.1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
SASARAN 6.2	Indikator Sasaran 2.1
Terwujudnya pemerintahan baik	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu
Indikator Sasaran 6.1	SASARAN 2.2
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja
Indikator Sasaran 6.2	Indikator Sasaran 2.2
Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja BKPPD 2. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti 3. Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

Gambar 2.1. Hubungan Keterkaitan Renstra PD BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

Adapun keterkaitan tujuan dengan sasaran BKPPD Kabupaten Balangan beserta indikator kerjanya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra PD 2016-2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Akhir Renstra PD 2016-2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas melalui Peningkatan Kompetensi dan Penataan Jabatan yang Memenuhi Standar Kompetensi	Indeks Profesionalitas ASN	81	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur yang Mengikuti Diklat Struktural	60%
2.	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan melalui Pengembangan Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pelaporan Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Cepat dan Tepat	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
				Meningkatnya Efektivitas Pelaporan	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja BKPPD	B
					Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100%
					Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah	100%

2.1.2. Rencana Kerja SKPD

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, maka BKPPD Kabupaten Balangan pada tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4.424.763.129,00 (*empat miliar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*) dengan target kinerja tercapai 100,00%. Anggaran sebesar tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) subkegiatan. Adapun rincian anggaran beserta target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Rencana Anggaran dan Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Uraian	Indikator	Target	
			Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP SKPD	64	2,888,835,929
		Laporan Keuangan sesuai SAP	100.00%	
		Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	
		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100.00%	
		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik	100.00%	
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	100.00%	31,900,000
1.1.1.	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan kerja dan anggaran SOPD	8 dokumen	15,110,000
1.1.2.	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja SOPD	4 dokumen	1,900,000
1.1.3.	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja dan keuangan	3 dokumen	14,890,000
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100.00%	2,338,167,454
1.2.1.	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	29 orang	2,311,707,454
1.2.2.	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	22,140,000
1.2.3.	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	5 laporan	4,320,000

No.	Uraian	Indikator	Target	
			Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00%	203,612,800
1.3.1.	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	100.00%	24,493,800
1.3.2.	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar 3 paket surat kabar lokal per bulan di masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian	12 bulan	12,820,000
1.3.3.	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyertaan perjalanan dinas luar daerah pada rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi, bimtek, kursus singkat dan pelatihan	12 bulan	166,299,000
		Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kegiatan rapat	12 bulan	
1.4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	100.00%	81,920,200
1.4.1.	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	4 paket	81,920,200
1.5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	177,127,975
1.5.1.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	4 paket/jasa	84,762,000
1.5.2.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	92,365,975
1.6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	56,107,500
1.6.1.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	20 unit	44,117,500
1.6.2.	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	25 unit	11,990,000

No.	Uraian	Indikator	Target	
			Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100.00%	1,535,927,200
		Persentasi penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	100.00%	
		Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100.00%	
		Meningkatnya kehadiran Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Kegiatan KORPRI	75.00%	
2.1.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK	47.00%	211,897,200
		Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini	100.00%	
2.1.1.	Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase penerbitan SK CPNS menjadi PNS tepat waktu	100.00%	23,162,200
2.1.2.	Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentasi penyelesaian pemberhentian dan Pemberian Pensiun ASN tepat waktu	100.00%	18,240,000
2.1.3.	Subkegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Apel Wawasan Kesadaran Nasional	10 kegiatan	35,786,000
		Terlaksananya kegiatan senam dalam rangka peningkatan kesehatan jasmani aparatur	45 kegiatan	
2.1.4.	Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pemutakhiran dan rekonsiliasi data pegawai yang dipublikasikan	1 dokumen	134,709,000
		Jumlah layanan kepegawaian berbasis elektronik yang terintegrasi	5 layanan	
2.2.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentasi jabatan terisi sesuai dengan kompetensi (struktural)	90%	192,806,000
2.2.1.	Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Persentasi Administrasi Penataan dan Mutasi Jabatan Tepat Waktu	100%	113,543,000
2.2.2	Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	100.00%	79,263,000

No.	Uraian	Indikator	Target	
			Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase peningkatan sumberdaya aparatur yang mengikuti diklat struktural	60.00%	935,942,000
2.3.1.	Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	8 orang	317,220,000
2.3.2.	Subkegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang dikirim dalam Pelaksanaan Diklat Pim II, III dan IV	16 orang	495,356,000
		Jumlah Calon ASN yang dikirim dalam Pelaksanaan Diklat Prajabatan	5 orang	
2.3.4.	Subkegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	700 orang	123,366,000
		Jumlah Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	2 kegiatan	
2.4.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang disiplin	100.00%	195,282,000
		Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat	100.00%	
2.4.1.	Subkegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan	4 kegiatan	155,525,000
2.4.2.	Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah usulan surat keputusan penganugerahan aparatur, satya lencana karya satya	200 SK	25,992,000
2.4.3.	Subkegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah SK Penegakkan Disiplin dan Perlindungan ASN	3 SK	13,765,000
Total Anggaran dan Target Kinerja			100.00%	4,424,763,129

2.1.3. Indikator Kinerja Utama SKPD

Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021 diarahkan dan dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan SKPD dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. IKU yang

dirumuskan pada tahun 2021 berjumlah 5 (lima) indikator, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perumusan Indikator Kinerja Utama SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan			Penanggung Jawab	Sumber Data
			Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Cara Perhitungan Indikator		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Sumberdaya Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural	Peningkatan kompetensi manajerial-kepemimpinan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas	Untuk mengetahui jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas yang telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan	$\frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Kompetensi Manajerial – Kepemimpinan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Pejabat Struktural pada Pemkab Balangan}} \times 100\%$	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Laporan pelaksanaan tugas kediklatan
2.	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat dan tepat	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Layanan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan SOP, meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pensiun	Untuk mengetahui capaian layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Selesai Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Diselenggarakan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian • Bidang Pengembangan Pegawai dan Mutasi 	BKPSDM
3.	Meningkatnya efektivitas pelaporan	Nilai predikat akuntabilitas dan kinerja BKPPD	Implementasi SAKIP	Untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP	Hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan Tim Inspektorat	Sekretariat	Hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan Inspektorat
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Tingkat kepatuhan/ketaatan terhadap tata kelola administrasi keuangan SKPD	Untuk mengetahui tingkat kepatuhan/ketaatan terhadap tata kelola administrasi keuangan SKPD	$\frac{\text{Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Keseluruhan Temuan BPK/Inspektorat}} \times 100\%$	Sekretariat	LHP BPK/Inspektorat
		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	Tingkat kepatuhan/ketaatan terhadap tata kelola administrasi aset SKPD	Untuk mengetahui tingkat kepatuhan/ketaatan terhadap tata kelola administrasi aset SKPD	$\frac{\text{Jumlah Barang/Aset SKPD yang Tercatat dengan Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Keseluruhan Barang/Aset yang dikuasai SKPD}} \times 100\%$	Sekretariat	Laporan aset

2.1.4. Perjanjian Kinerja SKPD

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala Daerah sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kepala BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur yang Mengikuti Diklat Struktural	60.00%
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Cepat dan Tepat	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100.00%
3.	Meningkatnya Efektifitas Pelaporan	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja BKPPD	B
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100.00%
		Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah	100.00%

Total anggaran yang dialokasikan untuk merealisasikan perjanjian kinerja tersebut sebesar Rp 8.080.032.000,00. Dengan rincian alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 5.367.591.500,00 dan Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp 2.712.440.500,00.

2.2. Perencanaan Kinerja SKPD Baru

2.2.1. Rencana Strategis SKPD

Renstra PD BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 diarahkan untuk turut berkontribusi mencapai Visi Bupati Balangan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 berikut:

“Membangun Desa, Menata Kota

Menuju Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera”

Misi yang dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;

2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara; dan
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM dalam melaksanakan manajemen ASN adalah Misi Keempat. Tujuan misi tersebut, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan sasaran dari Misi Keempat adalah Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi, dengan salah satu indikator berupa Nilai IKM. Dalam rangka mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran dimaksud, ditetapkan salah satu program yang menjadi tanggung jawab BKPSDM berupa Program Kepegawaian Daerah. Indikator keberhasilan pelaksanaan program tersebut, yaitu: IKM Layanan Kepegawaian, IP ASN, Indeks Sistem Merit, dan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN.

Beranjak dari Misi Keempat Bupati Balangan tersebut, maka tujuan strategis tahun 2021-2026 yang ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten Balangan adalah Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Adapun sasaran strategis dari tujuan dimaksud adalah Optimalitas Tata Kelola dan Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Keterkaitan hubungan antara Renstra PD BKPSDM Kabupaten Balangan dengan RPJMD Kabupaten Balangan dapat dilihat pada skema berikut:

RPJMD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026	RENSTRA PD BKPSDM TAHUN 2021-2026 (SKPD BARU)
VISI	TUJUAN
Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera	Meningkatnya profesionalitas ASN
	Indikator Tujuan
	Indeks Profesionalitas ASN
MISI IV	SASARAN
Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Optimalisasi tata kelola dan meningkatnya pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
TUJUAN 4	Indikator Sasaran
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN
SASARAN 4.4	2. Indeks Sistem Merit
Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kepegawaian
Indikator Sasaran 4.4	
Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	

Gambar 2.2. Hubungan Keterkaitan Renstra PD BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

Adapun keterkaitan tujuan dengan sasaran BKPSDM Kabupaten Balangan beserta indikator kinerjanya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra PD 2021-2026	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Akhir Renstra PD 2016-2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Profesionalitas Aparatus Sipil Negara (ASN)	Indeks Profesionalitas ASN	87	Optimalisasi Tata Kelola dan Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	75
					Indeks Sistem Merit	325
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kepegawaian	90

2.2.2. Rencana Kerja SKPD

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, maka BKPSDM Kabupaten Balangan pada tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.785.720.248,00 (*tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah*) dengan target kinerja tercapai 100,00%. Anggaran sebesar tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) subkegiatan. Adapun rincian anggaran beserta target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Rencana Anggaran dan Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022

No.	Uraian	Indikator	Target	
			Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM	64	1,943,608,048
		Persentase Pencatatan Pengelolaan Aset dalam Kondisi Baik	100.00%	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	100.00%	23,790,000
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan dengan baik	8 dokumen	16,610,000
1.1.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan dengan baik	3 dokumen	7,180,000

No.	Uraian	Indikator	Target	
			Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100.00%	1,461,900,862
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS/CPNS	100.00%	1,447,020,862
1.2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100.00%	14,880,000
1.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00%	71,500,000
1.3.1.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4680 eksemplar	6,700,000
1.3.2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	64,800,000
1.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	100.00%	222,299,586
1.4.1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	4 paket	222,299,586
1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	93,437,600
1.5.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	45,200,000
1.5.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	48,237,600
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	70,680,000
1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	20 unit	37,480,000
1.6.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya layak fungsi	100.00%	33,200,000

No.	Uraian	Indikator	Target	
			Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku	100.00%	1,144,877,000
2.1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK	47.00%	518,321,000
		Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini	100.00%	
2.1.1.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100.00%	407,726,000
2.1.2.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun ASN tepat waktu	100.00%	12,280,000
2.1.3.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan	100.00%	16,680,000
2.1.4.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pemutakhiran dan rekonsiliasi data pegawai yang dipublikasikan	100.00%	81,635,000
		Jumlah layanan kepegawaian berbasis elektronik yang terintegrasi	5 layanan	
2.2.	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi	100.00%	82,126,000
		Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tepat waktu	100.00%	
2.2.1.	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase layanan pengelolaan Mutasi ASN	100.00%	67,226,000
2.2.2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	100.00%	14,900,000
2.3.	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27.00%	459,440,000
2.3.1.	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Assesment	6 orang	57,680,000
2.3.2.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi	200 orang	251,760,000

No.	Uraian	Indikator	Target	
			Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.4.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk Belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	8 orang	150,000,000
2.4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai ASN yang disiplin	100.00%	84,990,000
		Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat	100.00%	
2.4.1.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah monev dan penyusunan SKP di lingkungan Pemkab Balangan	4 kegiatan	65,740,000
2.4.2.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah SK Penegakan Disiplin dan Perlindungan ASN	3 SK	19,250,000
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur	59.89%	697,235,200
3.1.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial	100.00%	697,235,200
		Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	100.00%	
3.1.1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Calon ASN yang memenuhi syarat Prajabatan/Latsar	114 orang	697,235,200
Total Anggaran dan Target Kinerja			100.00%	3,785,720,248

2.2.3. Indikator Kinerja Utama SKPD

Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021 diarahkan dan dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan SKPD dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. IKU yang

dirumuskan pada tahun 2021 berjumlah 3 (tiga) indikator, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7. Perumusan Indikator Kinerja Utama SKPD pada BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan			Penanggung Jawab	Sumber Data
			Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Cara Perhitungan Indikator		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Optimalisasi tata kelola dan meningkatnya pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Tingkat implementasi NSPK Manajemen Kepegawaian	Untuk mengetahui tingkat penerapan NSPK Manajemen ASN, sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan perundangan turunannya	Penilaian oleh BKN RI melalui aplikasi web Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN (https://indeksnspk.bkn.go.id/)	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN • Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN • Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 	BKN RI (hasil olah data yang diinput BKPSDM melalui aplikasi web NSPK)
		Indeks Sistem Merit	Penerapan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Untuk mengetahui capaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah, sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 40 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi ASN No. 9 Tahun 2019	Penilaian mandiri melalui aplikasi web SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) (https://sipinter.kasn.go.id/)	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN • Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN • Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 	Komisi ASN (hasil olah data yang disampaikan oleh BKPSDM melalui aplikasi web SIPINTER)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kepegawaian	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat (<i>customer</i>) terhadap layanan kepegawaian dan memperoleh umpan balik (<i>feedback</i>) sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan layanan	Penilaian melalui aplikasi web SKM BKPSDM (https://ikm.bkppd-balangankab.info/skm)	Sekretariat BKPSDM	BKPSDM Kab. Balangan (hasil olah data survey layanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan melalui aplikasi web SKM BKPSDM, sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 14 Tahun 2017)

2.2.4. Perjanjian Kinerja SKPD

Perjanjian kinerja BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Optimalisasi Tata Kelola dan Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	45
		Indeks Sistem Merit	260
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kepegawaian	85

Total anggaran yang dialokasikan untuk merealisasikan perjanjian kinerja tersebut sebesar Rp 3.785.720.248,00. Dengan rincian alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 1.943.608.048,00, Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp 1.144.877.000,00, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 697.235.200,00.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja SKPD Lama

3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi capaian masing-masing IKU. Untuk menentukan keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran SKPD, patokan yang digunakan adalah skala penilaian kinerja yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Penilaian Capaian Kinerja SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021

Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Capaian	Kategori
I	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
II	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
III	$66\% \leq 75\%$	Sedang
IV	$51\% \leq 65\%$	Rendah
V	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hasil pengukuran capaian sasaran strategis BKPPD Kabupaten Balangan pada tahun 2021 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	Kinerja 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Kab/Kota	Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Capaian Terhadap RPJMN
				Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur yang Mengikuti Diklat Struktural	94.17%	60.00%	35.70%	59.50%	60.00%	59.50%	-	-	-
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Cepat dan Tepat	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	107.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-
3.	Meningkatnya Efektifitas Pelaporan	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja BKPPD	B	B	BB	-	-	-	-	-	-
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-
		Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah	100.00%	100.00%	91.59%	91.59%	100.00%	91.59%	-	-	-

Penjelasan capaian masing-masing IKU sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah

IKU Sasaran Strategis tersebut adalah Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur yang Mengikuti Diklat Struktural. Indikator dimaksud memiliki makna peningkatan kompetensi manajerial-kepemimpinan PNS Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV).

Adapun formulasi indikator, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Kompetensi Manajerial – Kepemimpinan}}{\text{Jumlah keseluruhan Pejabat Struktural pada Pemerintah Kabupaten Balangan}} \times 100\%$$

Alasan pemilihan indikator dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, yaitu setiap aparatur harus memenuhi persyaratan

kompetensi, baik kompetensi manajerial maupun teknis dan fungsi. Sehingga formulasi tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV. Unit SKPD yang menjadi penanggung jawab sasaran strategis tersebut adalah Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKPPD.

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IKU Sasaran Strategis dimaksud pada tahun 2021 yang merupakan periode akhir Renstra PD BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 adalah sebesar 35,70% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Persentase tersebut didapat dari 563 orang Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, hanya 201 orang yang sudah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan serta memiliki Sertifikasi Kompetensi Manajerial-Kepemimpinan yang disyaratkan sesuai jenjang jabatan masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian IKU sasaran strategis tersebut termasuk kategori “Sangat Rendah”.

Penyebab tidak berhasilnya capaian kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tidak optimalnya pengikutsertaan Pejabat Struktural dalam Pelatihan Kepemimpinan yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dikarenakan keterbatasan anggaran dan kouta peserta pelatihan serta pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2 (dua) tahun terakhir (2020 dan 2021) dan masih berlangsung sampai sekarang.
- b. Pelatihan Kepemimpinan dengan Pola Fasilitasi di daerah belum dapat dilaksanakan di daerah, khususnya untuk jenjang Pelatihan Kepemimpinan bagi Pejabat Pengawas (Eselon IV). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten

Balangan, antara lain, tidak memiliki fasilitas kediklatan yang representatif dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan serta belum mempunyai SDM fasilitator/pengelola pelatihan yang memenuhi persyaratan.

- c. Promosi jabatan pada bulan Agustus 2021 sebagai implementasi perubahan SOTK menyebabkan penambahan yang sangat signifikan terhadap jumlah Pejabat Struktural yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan.

Alternatif solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut pada masa depan yaitu:

- a. Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait serta meningkatkan kerja sama dengan berbagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Balangan dapat memperoleh kuota peserta yang lebih banyak dan mendapat pembiayaan pelatihan dengan Pola PNBPD (Non-APBD).
- b. Menjajaki kemungkinan dan mulai mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan, agar Pelatihan Kepemimpinan dapat dilaksanakan dengan Pola Fasilitasi di daerah.
- c. Dalam rangka pemenuhan syarat menduduki suatu jabatan, maka lembaga yang berwenang di bidang kepegawaian daerah harus mencarikan alternatif pelatihan yang disetarakan dengan Pelatihan Kepemimpinan untuk memenuhi syarat kompetensi jabatan sesuai karakteristik jabatan masing-masing.

2. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Cepat dan Tepat

Sasaran Strategis tersebut dimaksudkan untuk mengetahui gambaran keberhasilan peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang diselenggarakan BKPPD. Adapun PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang menjadi sasaran pelayanan kepegawaian berjumlah 2.932 (data sampai dengan 23 Januari

2022). Sehingga IKU Sasaran Strategis tersebut adalah Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu, dengan fokus pada pelayanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), dan pension pegawai. Formulasi yang digunakan untuk mengukur IKU, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang selesai Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang diselenggarakan}} \times 100$$

Berdasarkan hasil pengukuran, IKU tersebut terealisasi sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. Adapun Unit SKPD yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab IKU adalah Bidang Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian serta Bidang Pengembangan Pegawai dan Mutasi pada BKPPD Kabupaten Balangan. Sehingga disimpulkan bahwa capaian IKU tersebut dapat dikategorikan “Sangat Tinggi”.

3. Meningkatnya Efektivitas Pelaporan

Penanggung jawab Sasaran Strategis tersebut adalah Sekretariat BKPPD Kabupaten Balangan. IKU Sasaran Strategis mencakup 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

a. Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja BKPPD

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKPPD sebagai bagian instansi pemerintah daerah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui Evaluasi SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen besar

manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi.

Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Balangan dan hasilnya dirilis pada tahun 2021 dituangkan dalam bentuk nilai, dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. BKPPD Kabupaten Balangan memperoleh nilai sebesar 71,38 atau predikat “BB” yang menunjukkan Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Hasil tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yang hasilnya diterbitkan pada tahun 2020, di mana BKPPD Kabupaten Balangan memperoleh nilai 63,18 atau predikat “B”. Sehingga capaian sasaran kinerja IKU dimaksud termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”.

Tabel 3.3. Rincian Hasil Evaluasi SAKIP pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2019 dan 2020

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai Tahun 2019	Nilai Tahun 2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,68	24,21
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,56	19,38
c.	Pelaporan Kinerja	15	8,86	11,86
d.	Evaluasi Internal	10	0,00	4,50
e.	Capaian Kinerja	20	15,08	11,43
Nilai Hasil Evaluasi		100	63,18	71,38
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	BB

b. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti

Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan selalu dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah. Oleh karena itu, bagi SKPD yang masih memiliki tunggakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) BPK agar selalu berkomunikasi dengan Inspektorat. Formula yang digunakan untuk mengukur IKU adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Keseluruhan Temuan BPK/Inspektorat}} \times 100\%$$

Formulasi tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan/ketaatan terhadap tata kelola administrasi keuangan SKPD. Berdasarkan hasil penilaian IKU, seluruh temuan BPK/Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh BKPPD Kabupaten Balangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian IKU tersebut pada tahun 2021 adalah 100% dan termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”.

c. Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

Barang/aset di lingkungan BKPPD Kabupaten Balangan dikelola berdasarkan pendekatan/prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam rangka mengetahui tingkat kepatuhan/ketaatan terhadap tata kelola administrasi barang/aset SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Barang/Aset SKPD yang Tercatat dengan Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Keseluruhan Barang/Aset yang dikuasai SKPD}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran untuk IKU dimaksud terealisasi sebesar 91,59%. Dengan kata lain, dari 440 total aset yang dikuasai oleh BKPPD Kabupaten Balangan, 403 aset diantaranya tercatat dengan kondisi baik. Sisanya, sebanyak 37 aset dalam kondisi rusak ringan. Capaian IKU sasaran strategis tersebut masih termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”.

Selain melakukan pengukuran capaian sasaran strategis, pihak berkepentingan pada BKPPD Kabupaten Balangan juga melakukan pengukuran capaian program, kegiatan, dan subkegiatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian program yang dilaksanakan BKPPD Kabupaten Balangan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 97,32% atau termasuk kategori “Sangat Tinggi”. Akan tetapi, apabila dilihat

secara terperinci, masih terdapat kegiatan dan subkegiatan yang capaian kerjanya dikategorikan “Sangat Rendah”, “Rendah”, dan “Sedang”. Hal ini harus menjadi perhatian pimpinan untuk langkah perbaikan kinerja di masa mendatang. Capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan pada BKPPD Kabupaten Balangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Uraian	Indikator	Kinerja			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	64	71.38	111.53	Sangat tinggi
		Laporan Keuangan sesuai SAP	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
		Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100.00%	91.59%	91.59	Sangat tinggi
		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	100.00%	73.33%	73.33	Sedang
1.1.1.	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan kerja dan anggaran SOPD	8 dokumen	6 dokumen	75.00	Sedang
1.1.2.	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja SOPD	4 dokumen	3 dokumen	75.00	Sedang
1.1.3.	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja dan keuangan	3 dokumen	2 dokumen	66.67	Sedang
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
1.2.1.	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	29 orang	29 orang	100.00	Sangat tinggi
1.2.2.	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	100.00	Sangat tinggi
1.2.3.	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	5 laporan	5 laporan	100.00	Sangat tinggi

No.	Uraian	Indikator	Kinerja			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1.3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00%	80.57%	80.57	Tinggi
1.3.1.	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
1.3.2.	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar 3 paket surat kabar lokal per bulan di masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian	12 bulan	8 bulan	66.67	Sedang
1.3.3.	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyertaan perjalanan dinas luar daerah pada rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi, bimtek, kursus singkat dan pelatihan	12 bulan	12 bulan	100.00	Sangat tinggi
		Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kegiatan rapat	12 bulan	12 bulan	100.00	Sangat tinggi
1.4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	100.00%	60.00%	60.00	Rendah
1.4.1.	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	4 paket	3 paket	75.00	Sedang
1.5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	8 bulan	66.67	Sedang
1.5.1.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	4 paket/jasa	4 paket/jasa	100.00	Sangat tinggi
1.5.2.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	8 bulan	66.67	Sedang
1.6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	8 bulan	66.67	Sedang
1.6.1.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	20 unit	15 unit	75.00	Sedang
1.6.2.	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	25 unit	19 unit	76.00	Tinggi

No.	Uraian	Indikator	Kinerja			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
		Persentasi penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
		Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
		Meningkatnya kehadiran Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Kegiatan KORPRI	75.00%	54.55%	72.73	Sedang
2.1.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK	47.00%	53.00%	112.76	Sangat tinggi
		Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
2.1.1.	Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase penerbitan SK CPNS menjadi PNS tepat waktu	100.00%	0.00%	0.00	Sangat rendah
2.1.2.	Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentasi penyelesaian pemberhentian dan Pemberian Pensiun ASN tepat waktu	100.00%	70.37%	70.37	Sedang
2.1.3.	Subkegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Apel Wawasan Kesadaran Nasional	10 kegiatan	kegiatan	0.00	Sangat rendah
		Terlaksananya kegiatan senam dalam rangka peningkatan kesehatan jasmani aparatur	45 kegiatan	12 kegiatan	26.67	Sangat rendah
2.1.4.	Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pemutakhiran dan rekonsiliasi data pegawai yang dipublikasikan	1 dokumen	1 dokumen	100.00	Sangat tinggi
		Jumlah layanan kepegawaian berbasis elektronik yang terintegrasi	5 layanan	3 layanan	60.00	Rendah
2.2.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentasi jabatan terisi sesuai dengan kompetensi (struktural)	90%	85.76%	95.28	Sangat tinggi
2.2.1.	Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Persentasi Administrasi Penataan dan Mutasi Jabatan Tepat Waktu	100%	70.00%	70.00	Sedang
2.2.2.	Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	100.00%	47.10%	47.10	Sangat rendah

No.	Uraian	Indikator	Kinerja			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
2.3.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan sumberdaya aparatur yang mengikuti diklat struktural	60.00%	35.70%	59.50	Rendah
2.3.1.	Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	8 orang	4 orang	50.00	Sangat rendah
2.3.2.	Subkegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang dikirim dalam Pelaksanaan Diklat Pim II, III dan IV	16 orang	11 orang	68.75	Sedang
		Jumlah Calon ASN yang dikirim dalam Pelaksanaan Diklat Prajabatan	5 orang	5 orang	100.00	Sangat tinggi
2.3.4.	Subkegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	700 orang	211 orang	30.14	Sangat rendah
		Jumlah Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00	Sangat tinggi
2.4.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang disiplin	100.00%	99.83%	99.83	Sangat tinggi
		Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat	100.00%	74.18%	74.18	Sedang
2.4.1.	Subkegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan	4 kegiatan	kegiatan	0.00	Sangat rendah
2.4.2.	Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah usulan surat keputusan penganugerahan aparatur, satya lencana karya satya	200 SK	SK	0.00	Sangat rendah
2.4.3.	Subkegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah SK Penegakkan Disiplin dan Perlindungan ASN	3 SK	4 SK	133.33	Sangat tinggi
Total Anggaran dan Rata-rata Capaian Kinerja Program			100.00%	97.32%	97.32	Sangat tinggi

Pengukuran capaian tujuan strategis dilakukan karena tahun 2021 merupakan periode akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil pengukuran secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan strategis yang ditetapkan relatif “Berhasil”, dimana 1 (satu) tujuan berhasil dengan kategori “Sangat Tinggi” dan 1 (satu) tujuan lainnya masih termasuk kategori “Tinggi”. Adapun rincian capaian tujuan strategis SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Pengukuran Capaian Tujuan Strategis SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra PD 2019 - 2021	Realisasi Capaian Tahun 2021	Capaian terhadap Target Akhir Renstra PD 2016 - 2021
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas melalui peningkatan kompetensi dan penataan jabatan yang memenuhi standar kompetensi	Indeks Profesionalitas ASN	81	67.05	82.78%
2.	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pengembangan sistem pelayanan administrasi kepegawaian dan pelaporan kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	83.71	107.32%

3.1.2. Realisasi Anggaran

Total anggaran BKPPD Kabupaten Balangan pada tahun 2021 berjumlah Rp 4.424.763.129,00 (*empat miliar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*). Realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 4.224.145.263,00 (*empat miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*) atau 95,47% dari target yang ditetapkan dan termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Adapun rincian anggaran program/kegiatan/subkegiatan beserta realisasi masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2,888,835,929	2,853,945,663	98.79
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,900,000	31,510,000	98.78
1.1.1.	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,110,000	14,720,000	97.42
1.1.2.	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,900,000	1,900,000	100.00
1.1.3.	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,890,000	14,890,000	100.00
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,338,167,454	2,336,587,582	99.93
1.2.1.	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,311,707,454	2,310,142,582	99.93
1.2.2.	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22,140,000	22,125,000	99.93
1.2.3.	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,320,000	4,320,000	100.00
1.3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	203,612,800	180,082,857	88.44
1.3.1.	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24,493,800	24,331,000	99.34
1.3.2.	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,820,000	12,640,000	98.60
1.3.3.	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166,299,000	143,111,857	86.06
1.4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81,920,200	77,516,390	94.62
1.4.1.	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81,920,200	77,516,390	94.62

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177,127,975	173,760,234	98.10
1.5.1.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84,762,000	84,736,759	99.97
1.5.2.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92,365,975	89,023,475	96.38
1.6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56,107,500	54,488,600	97.11
1.6.1.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,117,500	42,924,600	97.30
1.6.2.	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,990,000	11,564,000	96.45
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,535,927,200	1,370,199,600	89.21
2.1.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	211,897,200	204,038,599	96.29
2.1.1.	Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	23,162,200	23,062,000	99.57
2.1.2.	Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	18,240,000	18,232,000	99.96
2.1.3.	Subkegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	35,786,000	28,786,000	80.44
2.1.4.	Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	134,709,000	133,958,599	99.44
2.2.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	192,806,000	192,063,000	99.61
2.2.1.	Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	113,543,000	113,239,000	99.73
2.2.2.	Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	79,263,000	78,824,000	99.45
2.3.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	935,942,000	935,689,600	99.97
2.3.1.	Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	317,220,000	317,190,000	99.99
2.3.2.	Subkegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	495,356,000	495,356,000	100.00
2.3.4.	Subkegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	123,366,000	123,143,600	99.82

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
2.4.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	195,282,000	38,408,401	19.67
2.4.1.	Subkegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	155,525,000	24,678,401	15.87
2.4.2.	Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	25,992,000	0	0.00
2.4.3.	Subkegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	13,765,000	13,730,000	99.75
	Jumlah	4,424,763,129	4,224,145,263	95.47

Apabila diklasifikasi berdasarkan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan sasaran strategis, maka realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Tingkat Serapan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur yang Mengikuti Diklat Struktural	495,356,000.00	495,356,000.00	100.00
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Cepat dan Tepat	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	97,503,000.00	97,056,000.00	99.54
3.	Meningkatnya Efektifitas Pelaporan	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja BKPPD	31,900,000.00	31,510,000.00	98.78
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	31,900,000.00	31,510,000.00	98.78
		Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah	138,027,700.00	132,004,990.00	95.64

3.1.3. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai. Di mana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi pula efektivitasnya. Analisis efektivitas pada laporan ini mengadaptasi skala penilaian perangkat kinerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan pengkategorian sebagai berikut:

Tabel 3.8. Skala Penilaian Efektivitas Kinerja SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021

Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Capaian	Kategori
I	$91\% \leq 100\%$	Sangat Efektif
II	$76\% \leq 90\%$	Efektif
III	$66\% \leq 75\%$	Sedang
IV	$51\% \leq 65\%$	Tidak Efektif
V	$\leq 50\%$	Sangat Tidak Efektif

Sedangkan analisis efisiensi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat capaian sasaran beserta indikator yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya (*input*) tertentu, khususnya anggaran yang dialokasikan. Semakin tinggi anggaran yang dikeluarkan untuk mencapai target kinerja, maka tingkat efisiensi akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja, maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas terhadap capaian sasaran strategis pada tahun 2021, terdapat 4 (empat) IKU yang berkategori “Sangat Efektif” dan 1 (satu) IKU dengan kategori “Tidak Efektif”. Sedangkan hasil pengukuran efisiensi dari 5 (lima) IKU yang ditetapkan menunjukkan bahwa 3 (tiga) IKU dapat dikategorikan “Efisien” dan 2 (dua) IKU dengan kategori “Tidak Efisien”. Adapun rincian pengukuran efektivitas dan efisiensi IKU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Pengukuran Efektivitas dan Efisiensi Capaian Sasaran Strategis SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kinerja 2021			Serapan Anggaran Tahunan	Tingkat Efisiensi	Simpulan
			Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur yang Mengikuti Diklat Struktural	60.00%	35.70%	59.50%	100%	-40.50%	Tidak efektif dan tidak efisien
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Cepat dan Tepat	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100.00%	100.00%	100.00%	99.54%	0.46%	Sangat efektif dan efisien
3.	Meningkatnya Efektifitas Pelaporan	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja BKPPD	64.00	71.38	111.53%	98.78%	12.75%	Sangat efektif dan efisien
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%	98.78%	1.22%	Sangat efektif dan efisien
		Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah	100.00%	91.59%	91.59%	95.64%	-4.05%	Sangat efektif dan tidak efisien

Apabila dianalisis menurut program, kegiatan, dan subkegiatan, maka secara umum capaian rata-rata program BKPPD Kabupaten Balangan pada tahun 2021 sebesar 97,32% termasuk dalam kategori “Sangat Efektif”. Sedangkan hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa capaian rata-rata program termasuk kategori “Efisien”, dengan tingkat efisiensi 1,85%. Akan tetapi, jika diteliti secara terperinci, maka masih didapati kegiatan dan subkegiatan yang dapat dikategorikan “Sangat Tidak Efektif”, “Tidak Efektif”, dan “Sedang” serta “Tidak Efisien” dinilai dari analisis efisiensi. Hasil pengukuran efektivitas dan efisiensi program, kegiatan, dan subkegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Pengukuran Efektivitas dan Efisiensi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Uraian	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efektivitas	Efisiensi	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Tingkat Efisiensi	Simpulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP SKPD	64	71.38	111.53	2,888,835,929	2,853,945,663	98.79	Sangat efektif	12.74	Efisien
		Laporan Keuangan sesuai SAP	100.00%	100.00%	100.00				Sangat efektif	1.21	Efisien
		Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00%	100.00%	100.00				Sangat efektif	1.21	Efisien
		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100.00%	91.59%	91.59				Sangat efektif	-7.20	Tidak efisien
		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik	100.00%	100.00%	100.00				Sangat efektif	1.21	Efisien
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	100.00%	73.33%	73.33	31,900,000	31,510,000	98.78	Sedang	-25.44	Tidak efisien
1.1.1.	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan kerja dan anggaran SOPD	8 dokumen	6 dokumen	75.00	15,110,000	14,720,000	97.42	Sedang	-22.42	Tidak efisien
1.1.2.	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja SOPD	4 dokumen	3 dokumen	75.00	1,900,000	1,900,000	100.00	Sedang	-25.00	Tidak efisien
1.1.3.	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja dan keuangan	3 dokumen	2 dokumen	66.67	14,890,000	14,890,000	100.00	Sedang	-33.33	Tidak efisien
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100.00%	100.00%	100.00	2,338,167,454	2,336,587,582	99.93	Sangat efektif	0.07	Efisien
1.2.1.	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	29 orang	29 orang	100.00	2,311,707,454	2,310,142,582	99.93	Sangat efektif	0.07	Efisien
1.2.2.	Subkegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	100.00	22,140,000	22,125,000	99.93	Sangat efektif	0.07	Efisien
1.2.3.	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	5 laporan	5 laporan	100.00	4,320,000	4,320,000	100.00	Sangat efektif	0.00	Tidak efisien
1.3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00%	80.57%	80.57	203,612,800	180,082,857	88.44	Efektif	-7.88	Tidak efisien
1.3.1.	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	100.00%	100.00%	100.00	24,493,800	24,331,000	99.34	Sangat efektif	0.66	Efisien

No.	Uraian	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efektivitas	Efisiensi	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)		Tingkat Efisiensi	Simpulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar 3 paket surat kabar lokal per bulan di masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian	12 bulan	8 bulan	66.67	12,820,000	12,640,000	98.60	Sedang	-31.93	Tidak efisien
1.3.3.	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyertaan perjalanan dinas luar daerah pada rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi, bimtek, kursus singkat dan pelatihan	12 bulan	12 bulan	100.00	166,299,000	143,111,857	86.06	Sangat efektif	13.94	Efisien
		Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kegiatan rapat	12 bulan	12 bulan	100.00				Sangat efektif	13.94	Efisien
1.4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	100.00%	60.00%	60.00	81,920,200	77,516,390	94.62	Tidak efektif	-34.62	Tidak efisien
1.4.1.	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	4 paket	3 paket	75.00	81,920,200	77,516,390	94.62	Sedang	-19.62	Tidak efisien
1.5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	8 bulan	66.67	177,127,975	173,760,234	98.10	Sedang	-31.43	Tidak efisien
1.5.1.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	4 paket/jasa	4 paket/jasa	100.00	84,762,000	84,736,759	99.97	Sangat efektif	0.03	Efisien
1.5.2.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	8 bulan	66.67	92,365,975	89,023,475	96.38	Sedang	-29.71	Tidak efisien
1.6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	8 bulan	66.67	56,107,500	54,488,600	97.11	Sedang	-30.45	Tidak efisien
1.6.1.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	20 unit	15 unit	75.00	44,117,500	42,924,600	97.30	Sedang	-22.30	Tidak efisien
1.6.2.	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	25 unit	19 unit	76.00	11,990,000	11,564,000	96.45	Efektif	-20.45	Tidak efisien

No.	Uraian	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efektivitas	Efisiensi	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Tingkat Efisiensi	Simpulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00	1,535,927,200	1,370,199,600	89.21	Sangat efektif	10.79	Efisien
		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	100.00%	100.00%	100.00				Sangat efektif	10.79	Efisien
		Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00				Sangat efektif	10.79	Efisien
		Meningkatnya kehadiran Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Kegiatan KORPRI	75.00%	54.55%	72.73				Sedang	-16.48	Tidak efisien
2.1.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK	47.00%	53.00%	112.76	211,897,200	204,038,599	96.29	Sangat efektif	16.46	Efisien
		Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini	100.00%	100.00%	100.00				Sangat efektif	3.71	Efisien
2.1.1.	Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase penerbitan SK CPNS menjadi PNS tepat waktu	100.00%	0.00%	0.00	23,162,200	23,062,000	99.57	Sangat tidak efektif	-99.57	Tidak efisien
2.1.2.	Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase penyelesaian pemberhentian dan Pemberian Pensiun ASN tepat waktu	100.00%	70.37%	70.37	18,240,000	18,232,000	99.96	Sedang	-29.59	Tidak efisien
2.1.3.	Subkegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Apel Wawasan Kesadaran Nasional	10 kegiatan	kegiatan	0.00	35,786,000	28,786,000	80.44	Sangat tidak efektif	-80.44	Tidak efisien
		Terlaksananya kegiatan senam dalam rangka peningkatan kesehatan jasmani aparatur	45 kegiatan	12 kegiatan	26.67				Sangat tidak efektif	-53.77	Tidak efisien
2.1.4.	Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pemutakhiran dan rekonsiliasi data pegawai yang dipublikasikan	1 dokumen	1 dokumen	100.00	134,709,000	133,958,599	99.44	Sangat efektif	0.56	Efisien
		Jumlah layanan kepegawaian berbasis elektronik yang terintegrasi	5 layanan	3 layanan	60.00				Tidak efektif	-39.44	Tidak efisien
2.2.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan terisi sesuai dengan kompetensi (struktural)	90%	85.76%	95.28	192,806,000	192,063,000	99.61	Sangat efektif	-4.33	Tidak efisien
2.2.1.	Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Administrasi Penataan dan Mutasi Jabatan Tepat Waktu	100%	70.00%	70.00	113,543,000	113,239,000	99.73	Sedang	-29.73	Tidak efisien
2.2.2.	Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	100.00%	47.10%	47.10	79,263,000	78,824,000	99.45	Sangat tidak efektif	-52.35	Tidak efisien

No.	Uraian	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efektivitas	Efisiensi	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Tingkat Efisiensi	Simpulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan sumberdaya aparatur yang mengikuti diklat struktural	60.00%	35.70%	59.50	935,942,000	935,689,600	99.97	Tidak efektif	-40.47	Tidak efisien
2.3.1.	Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	8 orang	4 orang	50.00	317,220,000	317,190,000	99.99	Sangat tidak efektif	-49.99	Tidak efisien
2.3.2.	Subkegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang dikirim dalam Pelaksanaan Diklat Pim II, III dan IV	16 orang	11 orang	68.75	495,356,000	495,356,000	100.00	Sedang	-31.25	Tidak efisien
		Jumlah Calon ASN yang dikirim dalam Pelaksanaan Diklat Prajabatan	5 orang	5 orang	100.00				Sangat efektif	0.00	Tidak efisien
2.3.4.	Subkegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	700 orang	211 orang	30.14	123,366,000	123,143,600	99.82	Sangat tidak efektif	-69.68	Tidak efisien
		Jumlah Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00				Sangat efektif	0.18	Efisien
2.4.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang disiplin	100.00%	99.83%	99.83	195,282,000	38,408,401	19.67	Sangat efektif	80.16	Efisien
		Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat	100.00%	74.18%	74.18				Sedang	54.51	Efisien
2.4.1.	Subkegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan	4 kegiatan	kegiatan	0.00	155,525,000	24,678,401	15.87	Sangat tidak efektif	-15.87	Tidak efisien
2.4.2.	Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah usulan surat keputusan penganugerahan aparatur, satyaencana karya satya	200 SK	SK	0.00	25,992,000	0	0.00	Sangat tidak efektif	0.00	Tidak efisien
2.4.3.	Subkegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah SK Penegakkan Disiplin dan Perlindungan ASN	3 SK	4 SK	133.33	13,765,000	13,730,000	99.75	Sangat efektif	33.59	Efisien
Total Anggaran dan Rata-rata Capaian Kinerja Program			100.00%	97.32%	97.32	4,424,763,129	4,224,145,263	95.47	Sangat efektif	1.85	Efisien

3.2. Akuntabilitas Kinerja SKPD Baru

3.2.1. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran capaian sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Balangan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 2 (dua) IKU mencapai target yang ditetapkan dan 1

(satu) IKU yang data capaiannya belum ada. Adapun hasil pengukuran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

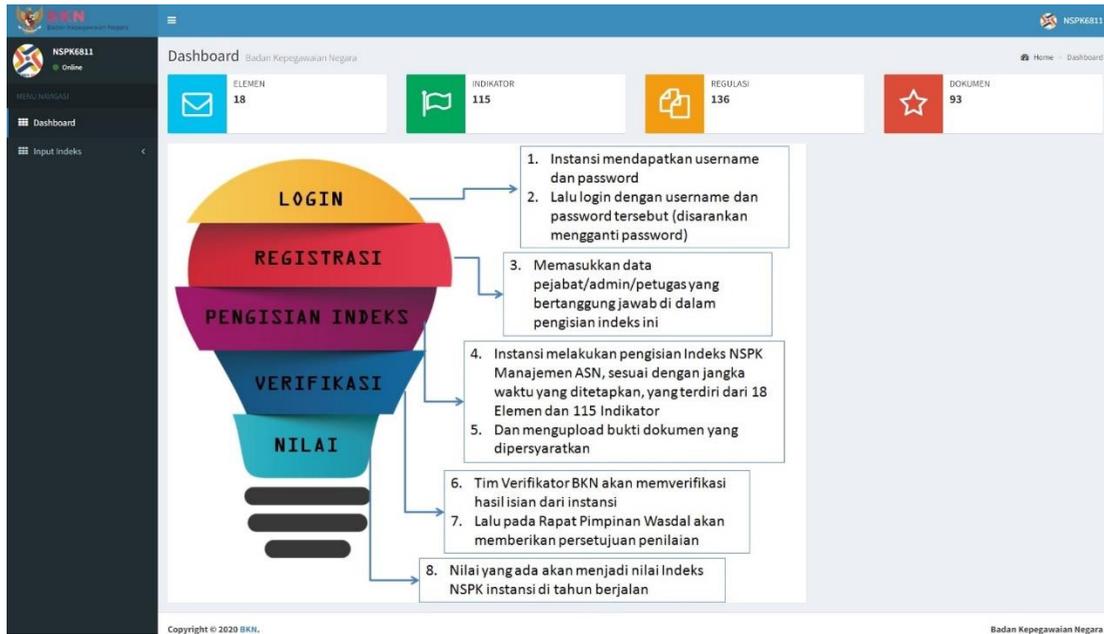
Tabel 3.10. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis SKPD pada BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	Kinerja 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Kab/Kota	Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Capaian Terhadap RPJMN
				Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Optimalisasi Tata Kelola dan dan Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	-	45	n/a	n/a	75	n/a	-	-	-
		Indeks Sistem Merit	257	260	277	106.54%	325	85.23%	-	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kepegawaian	83.71	85	88.31	103.89%	90	98.12%	-	-	-

Penjelasan capaian masing-masing IKU sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN

Penilaian menggunakan Aplikasi Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diberikan kewenangan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK sesuai UU No. 5 Tahun 2014. Tujuan penilaian adalah untuk memastikan tata kelola manajemen ASN di seluruh lingkup instansi pusat dan daerah berjalan sesuai koridor NSPK kepegawaian. Adapun unit SKPD yang menjadi penanggung jawab IKU adalah Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN, Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN, dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.



Gambar 3.1. Tangkapan Layar Aplikasi Web untuk Mengukur Indeks Implementasi Manajemen NSPK Manajemen ASN (<https://indeksnspk.bkn.go.id/>)

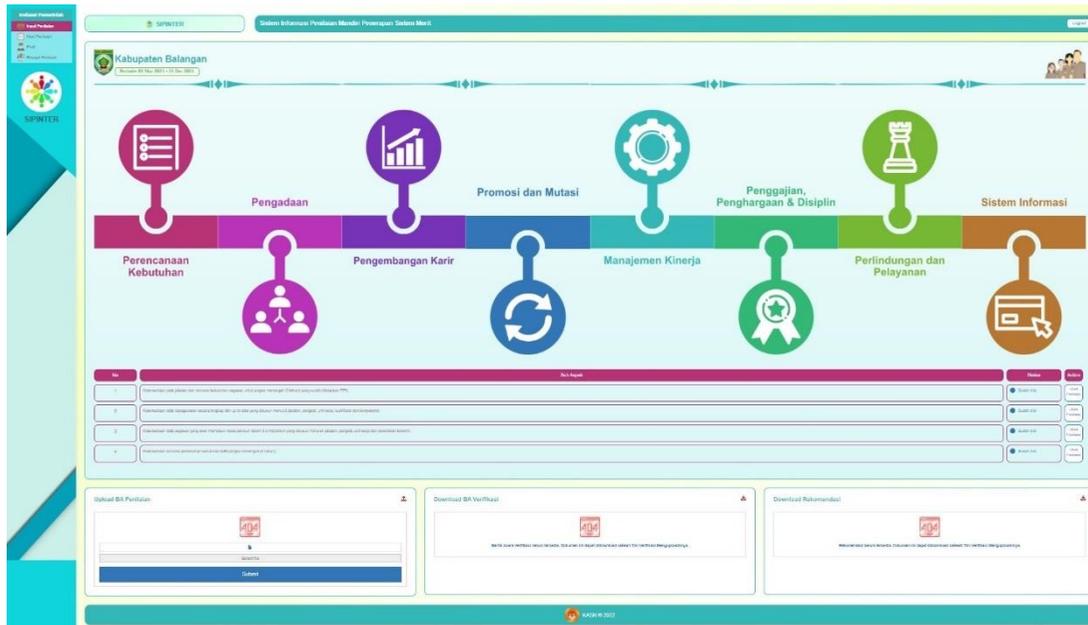
Adapun Indeks NSPK Manajemen ASN Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Balangan yang penilaian/pengukurannya dilakukan pada tahun 2021, masih menunggu hasil verifikasi dari Tim BKN. Oleh karena itu, capaian IKU tersebut masih belum dapat ditentukan keberhasilan/kegagalannya dan dinyatakan “Disclaimer”. Faktor utama pendukung keberhasilan pencapaian target adalah komitmen pimpinan terhadap penerapan NSPK Manajemen ASN, keberadaan SDM aparatur yang melaksanakan teknis operasional Manajemen ASN, serta ketersediaan sumber daya (khususnya anggaran) dan teknologi informasi yang mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi.

Faktor yang dapat menjadi menghambat dan harus diantisipasi di masa mendatang, antara lain, rendahnya kompetensi SDM aparatur serta hambatan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat penting untuk terus mengembangkan kompetensi

SDM aparatur yang dimiliki BKPSDM secara berkesinambungan, di samping terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholders* di bidang kepegawaian.

2. Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Unit kerja pada BKPSDM yang menjadi penanggung jawab IKU adalah Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN, Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN, dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hasil penilaian mandiri pada Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Sistem Merit (Sipinter) yang dikembangkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Indeks Sistem Merit Kabupaten Balangan pada tahun 2021 adalah 277. Artinya, tingkat penerapan Sistem Merit berada pada kategori III dengan sebutan baik. Sehingga dapat pula disimpulkan bahwa realisasi IKU tersebut tercapai 106,54% dari target indeks yang ditetapkan sebesar 260 pada tahun 2021. Jadi, capaian IKU Indeks Sistem Merit pada tahun 2021 termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”.

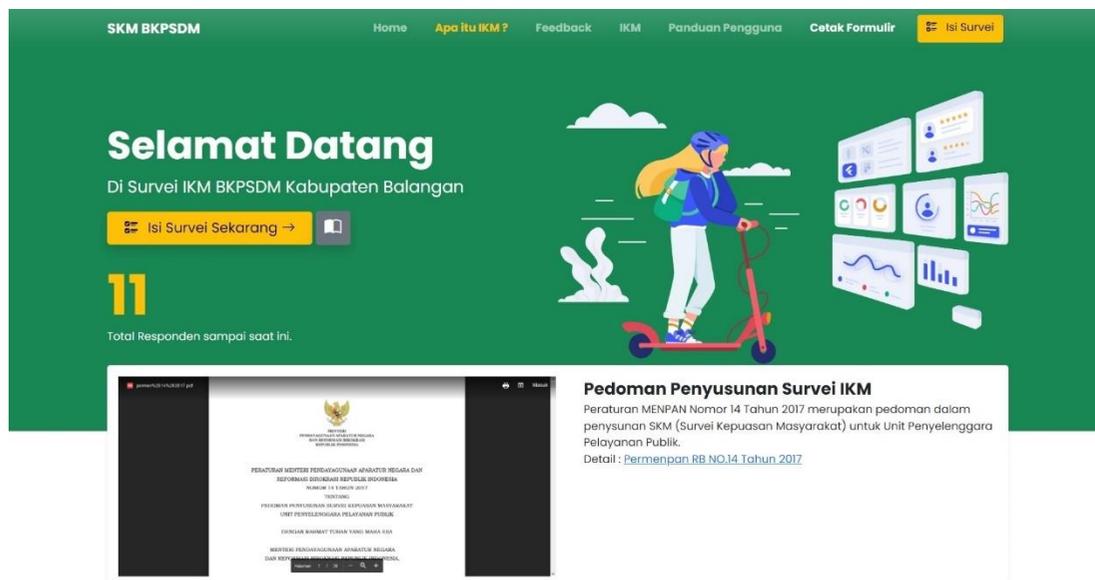


Gambar 3.2. Tangkapan Layar Aplikasi Web SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) untuk Mengukur Indeks Sistem Merit (<https://sipinter.kasn.go.id/>)

Faktor utama pendukung keberhasilan pencapaian target adalah komitmen pimpinan terhadap penerapan sistem merit, keberadaan SDM aparatur yang melaksanakan teknis operasional sistem merit, serta ketersediaan sumber daya (khususnya anggaran) dan teknologi informasi yang mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi. Sedangkan faktor yang berpotensi menjadi penghambat di masa depan dan harus diantisipasi, antara lain, rendahnya kompetensi SDM aparatur serta hambatan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat penting untuk terus mengembangkan kompetensi SDM aparatur yang dimiliki BKPSDM secara berkesinambungan, disamping terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholders* di bidang kepegawaian.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kepegawaian

Keberhasilan pencapaian target IKU ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat (*customer*) terhadap layanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, BKPSDM melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat melalui aplikasi web SKM BKPSDM yang pengembangannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Objek yang disurvei meliputi total 14 (empat belas) layanan yang meliputi: a) cuti; b) izin belajar; c) izin perceraian; d) kartu isteri/suami; e) kartu pegawai; f) kenaikan gaji berkala; g) kenaikan pangkat; h) mutasi pegawai; i) pemberhentian dan pension; j) pencantuman gelar; k) penjatuhan hukuman disiplin; l) santunan KORPRI; m) SKP online; dan n) tugas belajar.



Gambar 3.3. Tangkapan Layar Aplikasi Web Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BKPSDM untuk Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (<https://ikm.bkppd-balangankab.info/skm>)

Penanggung jawab IKU tersebut adalah Sekretariat BKPSDM Kabupaten Balangan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan sepanjang tahun 2021, hasil IKM BKPSDM memperoleh nilai 88,31 atau 103,89% dari target 85 yang ditetapkan. Sehingga berdasarkan realisasi tersebut, capaian IKU dimaksud termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Walaupun telah mencapai target yang ditetapkan dan berkinerja sangat tinggi, hal yang tetap harus menjadi perhatian pengambil kebijakan adalah keberadaan SDM aparatur yang menjadi ujung tombak pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting untuk mencapai target tersebut di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur tersebut secara terus menerus/berkesinambungan. Di samping itu, akan terus diupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Selain melakukan pengukuran capaian sasaran strategis, pihak berkepentingan pada BKPSDM Kabupaten Balangan juga melakukan pengukuran capaian program, kegiatan, dan subkegiatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian program yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Balangan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 85,64% atau termasuk kategori “Tinggi”. Akan tetapi, apabila dilihat secara terperinci, masih terdapat kegiatan dan subkegiatan yang capaian kerjanya dikategorikan “Sangat Rendah”, “Rendah”, dan “Sedang”. Hal ini harus menjadi perhatian pimpinan untuk langkah perbaikan kinerja di masa mendatang. Capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan pada BKPSDM Kabupaten Balangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SKPD pada BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Uraian	Indikator	Kinerja			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM	64	71.38	111.53	Sangat tinggi
		Persentase Pencatatan Pengelolaan Aset dalam Kondisi Baik	100.00%	95.33%	95.33	Sangat tinggi
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan dengan baik	8 dokumen	8 dokumen	100.00	Sangat tinggi
1.1.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan dengan baik	3 dokumen	3 dokumen	100.00	Sangat tinggi
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100.00%	94.44%	94.44	Sangat tinggi
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS/CPNS	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
1.2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
1.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
1.3.1.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4680 eksemplar	4680 eksemplar	100.00	Sangat tinggi
1.3.2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
1.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	100.00%	50.00%	50.00	Sangat rendah
1.4.1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	4 paket	2 paket	50.00	Sangat rendah
1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100.00	Sangat tinggi
1.5.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
1.5.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100.00	Sangat tinggi

No.	Uraian	Indikator	Kinerja			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100.00	Sangat tinggi
1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	20 unit	20 unit	100.00	Sangat tinggi
1.6.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya layak fungsi	100.00%	0.00%	0.00	Sangat rendah
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
2.1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK	47.00%	53.00%	112.76	Sangat tinggi
		Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
2.1.1.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
2.1.2.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun ASN tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
2.1.3.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan	100.00%	59.09%	59.09	Rendah
2.1.4.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pemutakhiran dan rekonsiliasi data pegawai yang dipublikasikan	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
		Jumlah layanan kepegawaian berbasis elektronik yang terintegrasi	5 layanan	5 layanan	100.00	Sangat tinggi
2.2.	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi	100.00%	53.00%	53.00	Rendah
		Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tepat waktu	100.00%	95.34%	95.34	Sangat tinggi
2.2.1.	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase layanan pengelolaan Mutasi ASN	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
2.2.2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	100.00%	95.34%	95.34	Sangat tinggi
2.3.	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27.00%	62.11%	230.04	Sangat tinggi
2.3.1.	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Assesment	6 orang	5 orang	83.33	Tinggi
2.3.2.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi	200 orang	359 orang	179.50	Sangat tinggi
2.3.4.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk Belajar dan Ikatn Dinas sesuai kebutuhan daerah	8 orang	6 orang	75.00	Sedang

No.	Uraian	Indikator	Kinerja			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
2.4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai ASN yang disiplin	100.00%	99.83%	99.83	Sangat tinggi
		Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat	100.00%	74.18%	74.18	Sedang
2.4.1.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah monev dan penyusunan SKP di lingkungan Pemkab Balangan	4 kegiatan	4 kegiatan	100.00	Sangat tinggi
2.4.2.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah SK Penegakan Disiplin dan Perlindungan ASN	3 SK	5 SK	166.67	Sangat tinggi
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur	59.89%	35.70%	59.61	Rendah
3.1.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial	100.00%	68.75%	68.75	Sedang
		Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	100.00%	100.00%	100.00	Sangat tinggi
3.1.1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Calon ASN yang memenuhi syarat Prajabatan/Latsar	114 orang	114 orang	100.00	Sangat tinggi
Total Anggaran dan Rata-rata Capaian Kinerja Program			100.00%	85.64%	85.64	Tinggi

3.2.2. Realisasi Anggaran

Total anggaran BKPSDM Kabupaten Balangan pada tahun 2021 berjumlah Rp 3.785.720.248,00 (*tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah*). Realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 3.120.939.850,00 (*tiga miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) atau 82,44% dari target yang ditetapkan. Realisasi sebesar tersebut masih termasuk dalam kategori “Tinggi”.

Adapun rincian anggaran program/kegiatan/subkegiatan beserta realisasi masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1,943,608,048	1,505,075,302	77.44
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,790,000	11,712,000	49.23
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,610,000	6,202,000	37.34
1.1.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,180,000	5,510,000	76.74
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,461,900,862	1,116,288,496	76.36
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,447,020,862	1,102,808,496	76.21
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14,880,000	13,480,000	90.59
1.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71,500,000	67,030,477	93.75
1.3.1.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,700,000	5,320,000	79.40
1.3.2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,800,000	61,710,477	95.23
1.2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	222,299,586	196,515,000	88.40
1.2.1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	222,299,586	196,515,000	88.40
1.3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93,437,600	85,525,829	91.53
1.3.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,200,000	38,463,229	85.10
1.3.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48,237,600	47,062,600	97.56
1.4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,680,000	28,003,500	39.62
1.4.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37,480,000	28,003,500	74.72
1.4.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33,200,000	0	0.00

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,144,877,000	942,153,329	82.29
2.1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	518,321,000	428,854,896	82.74
2.1.1.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	407,726,000	338,068,020	82.92
2.1.2.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12,280,000	5,280,000	43.00
2.1.3.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	16,680,000	7,960,000	47.72
2.1.4.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	81,635,000	77,546,876	94.99
2.2.	Mutasi dan Promosi ASN	82,126,000	67,632,300	82.35
2.2.1.	Pengelolaan Mutasi ASN	67,226,000	56,032,300	83.35
2.2.2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	14,900,000	11,600,000	77.85
2.3.	Pengembangan Kompetensi ASN	459,440,000	382,944,133	83.35
2.3.1.	Pengelolaan Assessment Center	57,680,000	48,772,000	84.56
2.3.2.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	251,760,000	234,172,133	93.01
2.3.3.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	150,000,000	100,000,000	66.67
2.4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	84,990,000	62,722,000	73.80
2.4.1.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	65,740,000	48,290,000	73.46
2.4.2.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	19,250,000	14,432,000	74.97
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	697,235,200	673,711,219	96.63
3.1.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	697,235,200	673,711,219	96.63
3.1.1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	697,235,200	673,711,219	96.63
	Jumlah	3,785,720,248	3,120,939,850	82.44

Apabila diklasifikasi berdasarkan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan sasaran strategis, maka realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Tingkat Serapan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis SKPD pada BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Optimalisasi Tata Kelola dan dan Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	3,785,720,248.00	3,120,939,850.00	82.44%
		Indeks Sistem Merit	3,785,720,248.00	3,120,939,850.00	82.44%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kepegawaian	3,785,720,248.00	3,120,939,850.00	82.44%

3.2.3. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas dan efisiensi terhadap capaian sasaran strategis pada tahun 2021, terdapat 2 (dua) IKU yang berkategori “Sangat Efektif” dan “Efisien” dan 1 (satu) IKU dengan kategori “Disclaimer”, karena hasilnya masih menunggu hasil verifikasi dari Tim BKN. Sehingga belum dapat ditentukan dan dianalisis tingkat efektivitas dan efisiensinya. Adapun rincian pengukuran efektivitas dan efisiensi IKU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Pengukuran Efektivitas dan Efisiensi Capaian Sasaran Strategis SKPD pada BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	Kinerja 2021			Serapan Anggaran Tahunan	Tingkat Efisiensi	Simpulan	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	-	45	n/a	n/a	82.44%	n/a	n/a	Menunggu hasil verifikasi dari Tim BKN RI
2	Indeks Sistem Merit	257	260	277	106.54%	82.44%	24.10%	Sangat efektif dan efisien	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	Kinerja 2021			Serapan Anggaran Tahunan	Tingkat Efisiensi	Simpulan	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kepegawaian	83.71	85	88.31	103.89%	82.44%	21.45%	Sangat efektif dan efisien	-

Apabila dianalisis menurut program, kegiatan, dan subkegiatan, maka secara umum capaian rata-rata program BKPSDM Kabupaten Balangan pada tahun 2021 sebesar 85,64% termasuk dalam kategori “Efektif”. Sedangkan hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa capaian rata-rata program termasuk kategori “Efisien”, dengan tingkat efisiensi 3,20%. Akan tetapi, jika diteliti secara terperinci, maka masih didapati kegiatan dan subkegiatan yang dapat dikategorikan “Sangat Tidak Efektif”, “Tidak Efektif”, dan “Sedang” serta “Tidak Efisien” dinilai dari analisis efisiensi. Hasil pengukuran efektivitas dan efisiensi program, kegiatan, dan subkegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Pengukuran Efektivitas dan Efisiensi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Uraian	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efektivitas	Efisiensi	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Tingkat Efisiensi	Simpulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM	64	71.38	111.53	1,943,608,048	1,505,075,302	77.44	Sangat efektif	34.09	Efisien
		Persentase Pencatatan Pengelolaan Aset dalam Kondisi Baik	100.00%	95.33%	95.33				Sangat efektif	17.89	Efisien
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	100.00%	100.00%	100.00	23,790,000	11,712,000	49.23	Sangat efektif	50.77	Efisien
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan dengan baik	8 dokumen	8 dokumen	100.00	16,610,000	6,202,000	37.34	Sangat efektif	62.66	Efisien

No.	Uraian	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efektivitas	Efisiensi	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Tingkat Efisiensi	Simpulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan dengan baik	3 dokumen	3 dokumen	100.00	7,180,000	5,510,000	76.74	Sangat efektif	23.26	Efisien
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100.00%	94.44%	94.44	1,461,900,862	1,116,288,496	76.36	Sangat efektif	18.09	Efisien
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS/CPNS	100.00%	100.00%	100.00	1,447,020,862	1,102,808,496	76.21	Sangat efektif	23.79	Efisien
1.2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100.00%	100.00%	100.00	14,880,000	13,480,000	90.59	Sangat efektif	9.41	Efisien
1.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00%	100.00%	100.00	71,500,000	67,030,477	93.75	Sangat efektif	6.25	Efisien
1.3.1.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4680 eksemplar	4680 eksemplar	100.00	6,700,000	5,320,000	79.40	Sangat efektif	20.60	Efisien
1.3.2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	100.00%	100.00	64,800,000	61,710,477	95.23	Sangat efektif	4.77	Efisien
1.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	100.00%	50.00%	50.00	222,299,586	196,515,000	88.40	Sangat tidak efektif	-38.40	Tidak efisien
1.4.1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	4 paket	2 paket	50.00	222,299,586	196,515,000	88.40	Sangat tidak efektif	-38.40	Tidak efisien
1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100.00	93,437,600	85,525,829	91.53	Sangat efektif	8.47	Efisien
1.5.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00%	100.00%	100.00	45,200,000	38,463,229	85.10	Sangat efektif	14.90	Efisien
1.5.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100.00	48,237,600	47,062,600	97.56	Sangat efektif	2.44	Efisien
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100.00	70,680,000	28,003,500	39.62	Sangat efektif	60.38	Efisien
1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	20 unit	20 unit	100.00	37,480,000	28,003,500	74.72	Sangat efektif	25.28	Efisien
1.6.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya layak fungsi	100.00%	0.00%	0.00	33,200,000	0	0.00	Sangat tidak efektif	0.00	Tidak efisien

No.	Uraian	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efektivitas	Efisiensi	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Tingkat Efisiensi	Simpulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku	100.00%	100.00%	100.00	1,144,877,000	942,153,329	82.29	Sangat efektif	17.71	Efisien
2.1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK	47.00%	53.00%	112.76	518,321,000	428,854,896	82.74	Sangat efektif	30.02	Efisien
		Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini	100.00%	100.00%	100.00				Sangat efektif	17.26	Efisien
2.1.1.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100.00%	100.00%	100.00	407,726,000	338,068,020	82.92	Sangat efektif	17.08	Efisien
2.1.2.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun ASN tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00	12,280,000	5,280,000	43.00	Sangat efektif	57.00	Efisien
2.1.3.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan	100.00%	59.09%	59.09	16,680,000	7,960,000	47.72	Tidak efektif	11.37	Efisien
2.1.4.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pemutakhiran dan rekonsiliasi data pegawai yang dipublikasikan	100.00%	100.00%	100.00	81,635,000	77,546,876	94.99	Sangat efektif	5.01	Efisien
		Jumlah layanan kepegawaian berbasis elektronik yang terintegrasi	5 layanan	5 layanan	100.00				Sangat efektif	5.01	Efisien
2.2.	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi	100.00%	53.00%	53.00	82,126,000	67,632,300	82.35	Tidak efektif	-29.36	Tidak efisien
		Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tepat waktu	100.00%	95.34%	95.34				Sangat efektif	12.99	Efisien
2.2.1.	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase layanan pengelolaan Mutasi ASN	100.00%	100.00%	100.00	67,226,000	56,032,300	83.35	Sangat efektif	16.65	Efisien
2.2.2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	100.00%	95.34%	95.34	14,900,000	11,600,000	77.85	Sangat efektif	17.49	Efisien
2.3.	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27.00%	62.11%	230.04	459,440,000	382,944,133	83.35	Sangat efektif	146.69	Efisien
2.3.1.	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Assesment	6 orang	5 orang	83.33	57,680,000	48,772,000	84.56	Efektif	-1.22	Tidak efisien
2.3.2.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi	200 orang	359 orang	179.50	251,760,000	234,172,133	93.01	Sangat efektif	86.49	Efisien
2.3.4.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk Belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	8 orang	6 orang	75.00	150,000,000	100,000,000	66.67	Sedang	8.33	Efisien

No.	Uraian	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efektivitas	Efisiensi	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Tingkat Efisiensi	Simpulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai ASN yang disiplin	100.00%	99.83%	99.83	84,990,000	62,722,000	73.80	Sangat efektif	26.03	Efisien
		Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat	100.00%	74.18%	74.18				Sedang	0.38	Efisien
2.4.1.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah movev dan penyusunan SKP di lingkungan Pemkab Balangan	4 kegiatan	4 kegiatan	100.00	65,740,000	48,290,000	73.46	Sangat efektif	26.54	Efisien
2.4.2.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah SK Penegakan Disiplin dan Perlindungan ASN	3 SK	5 SK	166.67	19,250,000	14,432,000	74.97	Sangat efektif	91.70	Efisien
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur	59.89%	35.70%	59.61	697,235,200	673,711,219	96.63	Tidak efektif	-37.01	Tidak efisien
3.1.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial	100.00%	68.75%	68.75	697,235,200	673,711,219	96.63	Sedang	-27.88	Tidak efisien
		Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	100.00%	100.00%	100.00				Sangat efektif	3.37	Efisien
3.1.1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Calon ASN yang memenuhi syarat Prajabatan/Latsar	114 orang	114 orang	100.00	697,235,200	673,711,219	96.63	Sangat efektif	3.37	Efisien
Total Anggaran dan Rata-rata Capaian Kinerja Program			100.00%	85.64%	85.64	3,785,720,248	3,120,939,850	82.44	Efektif	3.20	Efisien

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Tahun 2021 merupakan periode akhir Renstra PD BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, hanya 1 (satu) tujuan strategis yang berhasil dicapai secara optimal. Sedangkan 1 (satu) tujuan strategis lainnya belum memenuhi harapan, yaitu tercapai secara optimal. Tujuan strategis yang berhasil dicapai secara optimal adalah Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan melalui Pengembangan Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pelaporan Kinerja, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dan tercapai sebesar 107,32% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Adapun tujuan yang belum tercapai optimal sampai akhir periode adalah Terwujudnya Sumberdaya Manusia ASN yang Berkualitas melalui Peningkatan Kompetensi dan Penataan Jabatan yang Memenuhi Standar Kompetensi, dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN, dan hanya terealisasi 82,78% dengan kategori “Tinggi”.
2. Jika dilihat dari aspek capaian sasaran strategis atau kinerja utama yang diperjanjikan, maka 4 (empat) dari 5 (lima) IKU yang ditetapkan berhasil direalisasikan. Sasaran strategis dan IKU yang berhasil direalisasikan adalah sebagai berikut:
 - a. Sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Cepat dan Tepat, dengan IKU Persentase Administrasi Kepegawaian yang

Diselesaikan Tepat Waktu, realisasi kinerja sebesar 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

- b. Sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pelaporan, dengan IKU:
 - 1) Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja BKPPD, realisasi kinerja BB dengan predikat “Sangat Baik”, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
 - 2) Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti, realisasi 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”.
 - 3) Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah, realisasi 91,59% dengan kategori “Sangat Tinggi”.
3. Capaian sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Balangan pada tahun 2021 yang merupakan periode pertama Renstra PD Tahun 2021-2026 sudah relatif baik. Sasaran strategis BKPSDM adalah Optimalisasi Tata Kelola dan Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan. Dari 3 (tiga) IKU yang ditetapkan, 2 (dua) IKU tercapai sesuai target dan 1 (satu) IKU lagi hasilnya masih menunggu keputusan dari instansi berwenang. Adapun uraian IKU dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. IKU Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN, hasilnya masih dinyatakan “Disclaimer”, karena hasilnya menunggu verifikasi dari Tim BKN.
 - b. IKU Indeks Sistem Merit, terealisasi sebesar 106,54% dengan kategori “Sangat Tinggi”.
 - c. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepegawaian, terealisasi sebesar 103,89% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

4.2. Saran Perbaikan

Dalam rangka langkah korektif dan preventif di masa yang akan datang, maka kepada pihak-pihak terkait disarankan:

1. Perlunya pengembangan kompetensi bagi SDM Aparatur yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Selain didasari alasan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, publik juga menuntut percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan. Tuntutan tersebut hanya dapat dilakukan oleh ASN yang kompeten.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana BKPSDM Kabupaten Balangan yang berbasis pada kebutuhan dan skala prioritas. Terutama sarana dan prasarana kediklatan dengan tujuan jangka panjang dapat melaksanakan berbagai pengembangan kompetensi ASN di daerah, khususnya pelatihan dengan pola fasilitasi.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
4. Meningkatkan instensitas kerja sama di bidang pengembangan SDM (pendidikan dan pelatihan) dengan berbagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. Hal tersebut harus dilakukan untuk mengentaskan masalah masih rendahnya tingkat kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Balangan.